

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)**

Imad Humaedi^{1(a)}, Ayuning Budiati^{2(b)}, Rina Yulianti^{3(c)}

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{a)}imadhumaedi8@gmail.com, ^{b)}ayuning.budiati@untirta.ac.id, ^{c)}rina.yulianti@untirta.ac.id

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

12-06-2024

Diterbitkan Online:

30-06-2024

Kata Kunci:

Implementasi, Pariwisata,
Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan implementasi penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah, mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki implementasi penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada pengungkapan mendalam, sehingga pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode untuk menganalisis data hasil penelitian, hal tersebut berkaitan dengan fenomena permasalahan yang dikaji dan diteliti. Berdasarkan pembahasan hasil wawancara kepada informan-informan dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn didalam menganalisis penelitian mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak) dapat diketahui dengan gamblang bahwa Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten lebak belum optimal, dalam pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sehingga tujuan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum bisa tercapai dengan baik.

Keywords:

Implementation, Tourism,
Local Revenue

Corresponding Author:

imadhumaedi8@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the success of the implementation of tourism in increasing local revenue, to find out the factors that hinder the implementation of tourism in increasing local revenue, and to find out the efforts that can be made to improve the implementation of tourism in increasing local revenue. This research was conducted on in-depth disclosure, so the qualitative approach was used to analyze the research data; it was related to the phenomenon of the problems studied and researched. Based on the discussion of the results of interviews with informants, it can be concluded that several aspects developed by Van Meter and Van Horn in analyzing research on the Implementation of Tourism Implementation in Increasing Regional Original Revenue (Case Study of Sawarna Area, Lebak Regency) can be seen that the Implementation of Tourism Implementation policies in Increasing Regional Original Revenue in Lebak Regency is not optimal, in its implementation it has not shown satisfactory results so that the purpose of organizing tourism in increasing local revenue cannot be adequately achieved.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.1018>

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 574 objek wisata dikelola oleh pemerintah daerah, hal ini tentu memberikan hal yang positif dalam pengelolaan wisata oleh pemerintah daerah, Kabupaten Lebak sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten memiliki potensi di sektor pariwisata yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik, pengelolaan pariwisata juga akan memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak.

Pemerintah kabupaten Lebak menerbitkan peraturan daerah No 2. Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai mana pada pasal 6 terkait prinsip penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme. Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan pengertian pemberian wewenang dan kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya daerah sendiri untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan konsekuensi pada hubungan sentral pola pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pendelegasian kewenangan tersebut untuk menjalankan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan Langkah yang dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan adanya produk-produk sektor pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah terdata dan juga menjadi rekomendasi pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk dikunjungi dan sekaligus mendapatkan penilaian tentang bagaimana status pariwisata yang ada di Kabupaten Lebak. Data produk wisata Kabupaten Lebak sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Produk Wisata Kabupaten Lebak Berdasarkan Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024

No.	Produk Wisata	Jumlah
1	Wisata Alam	30
2	Wisata Budaya	30
3	Wisata Buatan	12

Sumber : Badan Kememparekraf (2024)

Berdasarkan observasi peneliti ditemukan bahwa pandemi Covid-19 yang bermula pada akhir tahun 2019 telah berdampak berkepanjangan pada pariwisata Kabupaten Lebak khususnya pariwisata pantai Desa Sawarna di Kabupaten Lebak. Sektor Pariwisata Pantai Sawarna mengalami dampak pengunjung dari wisatawan mancanegara karena adanya Pandemi. Sebagaimana hasil observasi diketahui bahwa perolehan Pendapatan pengelola tempat wisata pada saat terjadinya pandemi ini mengalami penurunan sehingga ini juga mempengaruhi PAD yang berasal dari sektor Pariwisata khususnya Pantai Sawarna yang tidak bisa mencapai hasil yang maksimal pada tahun 2020-2022.

Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan penataan kembali terhadap destinasi wisata di Kabupaten Lebak, dengan harapan Pemerintah kabupaten Lebak dapat kembali menggenjot sektor Pariwisata di tahun 2023 dan 2024 menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lebak secara signifikan. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak bahwa perolehan PAD pada sektor wisata sendiri disumbang dari 4 destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lebak yakni Pantai Sawarna, Bagedur, Kebuh Teh Cikuya, dan Pemandian Wisata Air Panas Tirta Lebak Buana. Sementara itu menurut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Lebak realisasi PAD menurut jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah) Tahun 2020–2023

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	377.504.404,12	385.144.019,22
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	119.245.503,32	156.917.968,63
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	15.470.158,63	15.138.012,06
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	5.231.517,85	5.282.756,99
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	237.557.224,32	207.805.281,54
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.500.223.029,15	1.534.182.905,06
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	55.083.458,70	83.719.227,50
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	1.878.495,54	3.499.570,59
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1.014.388.131,00	1.013.013.728,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	428.872.943,91	433.950.378,97
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	669.359.626,94	724.392.942,76
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	212.031.149,04	206.032.533,07
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah/Lainnya Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	76.626.548,90	183.165.400,69
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Regional Adjustment and Autonomy Fund	315.701.929,00	310.195.009,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	65.000.000,00	25.000.000,00
3.6 Lainnya/Others	-	-
Jumlah/Total	2.547.087.060,21	2.643.719.867,04

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2022	2023
(1)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	421.548.555,37	434.184.904.574,00
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	169.689.458,36	169.438.067.795,00
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	15.504.908,24	16.909.070.043,00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	6.023.001,56	6.383.013.937,00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	230.331.187,21	241.454.752.799,00
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.626.084.052,81	...
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	63.818.297,37	...
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	4.523.970,00	...
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1.012.653.287,00	...

2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	545.088.498,44	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	601.380.429,69	2.247.735.345.128,00
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	68.770.895,22	18.169.373.946,00
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-	...
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	189.149.346,47	...
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Regional Adjustment and Autonomy Fund	324.844.445,00	...
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	18.615.743,00	2.229.554.953.182,00
3.6 Lainnya/Others	-	11.018.000,00
Jumlah/Total	2.649.013.037,87	2.681.920.249.702,00

Sumber : BPS, Kabupaten Lebak Dalam Angka (2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak mengalami kenaikan setiap tahunnya dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Lebak Rp. 377.504.404,12 sementara pada tahun 2021 Rp. 385.144.019,22, 2022 Rp. 421.548.555,37, dan pada tahun 2023 Rp. 434.184.904.574,00. Hal ini menunjukkan dalam perolehan pendapatan asli daerah dari berbagai jenis pendapatan terus mengalami kenaikan. Namun, jika dilihat dari pendapatan pajak daerah terdapat penurunan pada tahun 2022 ke 2023 yakni dari Rp. 169.689.458,36 menjadi Rp. 169.438.067.795,00. Oleh karenanya kontribusi sektor pariwisata perlu dikaji apakah kontribusinya terus meningkat atau justru sebaliknya sebagaimana data perolehan pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 ke tahun 2023.

Perkembangan pariwisata Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak ini tegerus mengalami tantangan dan persoalan diantaranya masih terdapat sampah plastik dan botol yang berserakan dibuang pengunjung di sembarang tempat. Terlihat pula beberapa tempat titik penampungan sampah terlihat terlalu jauh sehingga menyulitkan pengunjung membuang sampah. Selain itu kesadaran pengunjung menjaga kebersihan masih kurang, sehingga mengganggu kenyamanan wisata. Dalam hal mengakses beberapa fasilitas wisata, seperti penyewaan alat surfing dan berenang juga masih terbatas.

Kondisi objek wisata Pantai Sawarna yang berada di bibir pantai Laut Samudera Hindia dikenal sebagai Laut lepas dan cukup deras arus

air dan tinggi gelombang ombaknya. Hal tersebut, mengakibatkan beberapa kejadian kecelakaan pada pengunjung dan kerap hanyut terbawa arus laut saat berenang di pantai. Artinya keamanan pengunjung belum terjamin dengan baik dari pengelola wisata serta sosialisasi yang belum maksimal terhadap keamanan dan keselamatan pengunjung pantai Sawarna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pengungkapan mendalam, sehingga pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode untuk menganalisis data hasil penelitian, hal tersebut berkaitan dengan fenomena permasalahan yang dikaji dan diteliti.

Tabel 3. Operasionalisasi Model Implementasi Kebijakan Van Metter Van Horn

Judul	Aspek	Dimensi
Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)	1. Ukuran dan tujuan kebijakan	1. Tujuan
		2. Ukuran
		3. Ketepatan
	2. Sumber daya	1. Sumber Daya Manusia
		2. Waktu
		3. Pembiayaan
		4. Sarana dan Prasarana
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
		2. Pembagian Tugas (staffing)
	4. Sikap/kecenderungan para pelaksana	1. Respon
		2. Intensitas
	5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana	1. Komunikasi
		2. Koordinasi
		3. Sosialisasi
		4. Kejelasan dan Konsistensi
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Kondisi Ekonomi
		2. Kondisi Sosial
		3. Kondisi Politik

Sumber: Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa teori yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2019: 133-136) memiliki 6 (enam) aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Unsur Informan	Jabatan/Status Informan	Peran dan Fungsi Informan	Keterangan
1.	Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	Kepala Dinas	Pem buat Kebijakan di tingkat kabupaten	Key Informant
2.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Lebak	Kepala Bidang	OPD yang mempunyai peran sebagai penghimpun PAD	Key Informant
3.	Dinas Perhubungan Kab. Lebak	Kepala Bidang	Sebagai salah satu OPD Pemungut Retribusi	Key Informant
4.	Pemintah Desa Sawarna Sebagai penanggungjawab	Kepala Desa	Pem buat kebijakan dan pengelola di Desa Sawarna	Secondary Informant
5.	Unsur Pengelola Wisata Desa Sawarna	Ketua Pengelola	Pengelola pariwisata Desa sawarna	Key Informant
6.	Paguyuban Pemilik Home Stay	Ketua Paguyuban	Organisasi Swasta yang berinvestasi dalam pariwisata Sawarna	Secondary Informant
7.	Pemilik Warung di lokasi Wisata	Swasta	Swasta yang mendukung wisata sawarna	Secondary Informant
8.	Pengunjung wisata	Wisatawan	Berperan sebagai konsumen yang merasakan keadaan Pariwisata Sawarna	Key Informant

Sumber: Peneliti (2023)

Teknik Pengumpulan Data

Secara teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln & Guba (dalam Moleong, 2010: 186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak).”, yaitu wawancara mendalam yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi, ia bisa tidak terlibat intensif dalam kehidupan sosial informan, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Peneliti bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi secara jelas, konkret, dan lebih mendalam. Pada prinsipnya metode ini merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya yang berkaitan dengan “Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)”.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat didalam program kampung KB. Pihak yang terlibat baik kelompok kerja kampung KB, maupun para kader kampung KB Kelurahan nyapah, dinas terkait dan juga unsur lain yang memungkinkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk diinterpretasikan kedalam pembahasan penelitian yang lebih komprehensif.

b) Metode Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2011: 145) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan media panca indra dan peneliti sendiri secara langsung ke lapangan penelitiannya. Observasi dilakukan dalam rangka melihat serta mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti serta fokus penelitian secara lebih cermat, observasi dilakukan di Desa Sawarna dengan mengamati berbagai hal termasuk ikut kedalam kegiatan

yang dilakukan oleh pengelola wisata sawarna, Observasi juga dilakukan pada masing-masing informan. Pengamatan bermakna bahwa data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan secara langsung secara wajar, asli, spontan dan tidak ada perekayasa dalam kurun waktu tertentu sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci.

Pengamatan/observasi juga berguna untuk mengumpulkan data- data primer dan sekunder mengenai Penyelenggaraan Pariwisata di Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak, pengumpulan data-data berfungsi sebagai dukungan penguatan terhadap permasalahan yang terjadi dan teramati oleh peneliti. Adanya data juga memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah sebenarnya yang terjadi.

c) Studi Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh informasi yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui kuesioner, observasi dan wawancara mendalam. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian mengenai “Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)” digunakan sebagai data pendukung terkait masalah penelitian. Dengan adanya data pendukung tersebut ditujukan sebagai penguat argumentasi dari data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lebak memiliki potensi alam yang melimpah, di antaranya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan tambang. Sektor unggulan di Kabupaten Lebak adalah pertanian, terutama di sektor padi dan jagung. Kabupaten Lebak juga memiliki potensi wisata alam yang cukup menarik, seperti pantai Sawarna dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, terutama wisata alam. Beberapa tempat wisata

yang terkenal di Kabupaten Lebak adalah pantai Sawarna, wisata air terjun Curug Cikaso, dan wisata air terjun Leuwi Hejo. Selain itu, Kabupaten Lebak juga memiliki kekayaan budaya yang kental, seperti kesenian musik gamelan dan seni tari Topeng Lebak

Pantai Sawarna merupakan objek wisata alam yang berada di Desa Wisata Sawarna Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, yang memiliki objek daya tarik wisata alam pantai. Di sisi selatan Sawarna berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pantai berpasir putih yang diselangi karang-karang, sawah dan bukit membuat pantai sawarna memiliki banyak titik objek wisata yang dapat di jelajahi wisatawan. Objek wisata tersebut diantaranya:

Tabel Tabel 5. Data Kunjungan Wisata Pantai Sawarna Tahun 2021-2024

Tahun	Tanjung Layar	Legon Pari	Jumlah
2021	20596	1072	21668
2022	18386	987	19373
2023	18298	996	19294
Total	57280	3055	60335

Sumber : Bumdes Warna Jaya Sawarna (Data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan terhadap wisata pantai sawarna cukup tinggi peminatnya, meskipun pada bulan Februari - Maret mengalami penurunan sebagaimana data di atas, ada berbagai faktor penurunan itu bisa terjadi diantaranya daya tarik daerah tujuan wisata, fasilitas daerah tujuan wisata dan kemudahan - kemudahan pencapaian daerah tujuan atau aksesibilitas. Untuk mengetahui masalah pada faktor-faktor tersebut peneliti mencoba melakukan observasi dan wawancara mendalam. Penurunan pengunjung pantai Sawarna secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Tantangan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Lebak juga terlihat dari minimnya infrastruktur yang memadai serta minimnya akses informasi dan teknologi. Upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak adalah memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan akses informasi dan teknologi di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)

Implementasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, implementasi adalah suatu cara untuk melihat dan menilai apakah suatu kebijakan publik atau program itu berjalan dengan baik atau tidak atau dapat dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau justru sebaliknya dalam hal ini akan menentukan tujuan sebuah kebijakan akan tercapai atau tidak. Menurut Mulyadi (2015:24).

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi mempunyai definisi yang beragam, sejumlah ahli mendefinisikan implementasi dengan kebijakan publik. Metter dan Horn ((Agustino, 2016)) implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Selain itu definisi mengenai evaluasi kebijakan publik seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2016) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak) adalah dengan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan aspek-aspek implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang kemudian disajikan untuk dijadikan pertimbangan mengenai objek yang dievaluasi dalam hal ini Implementasi

Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak).

Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak) menjadi hal yang sangat krusial untuk dibahas dalam penelitian ini, dari penelitian ini mencoba melihat secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Lebak khususnya wisata Pantai Sawarna dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lebak.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)

Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan prinsip pengembangan yang termuat dalam dasar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dalam UU RI tersebut disebutkan bahwa pembangunan sektor pariwisata harus mempertimbangkan keanekaragaman, keunikan, kekhasan alam & budaya, serta kebutuhan manusia berpariwisata. Selain itu, dalam UU RI tersebut juga disebutkan bahwa pembangunan sektor pariwisata harus mempertimbangkan rencana induk pembangunan sektor pariwisata, mulai dari lingkup kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Lebih jauh, dalam UU RI tersebut disebutkan bahwa pengembangan & penelitian pariwisata harus dilakukan oleh pemerintah & lembaga terkait, serta terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kawasan strategis pariwisata.

Pada era globalisasi, sektor pariwisata memiliki peran penting dan sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber yang cukup teruji dalam menghasilkan devisa serta mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Kemajuan pada sektor pariwisata didukung oleh pemerintah dengan membuat berbagai kebijakan dan rencana pembangunan, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu menggali, menginventarisir, dan mengembangkan objek wisata yang ada Sebagai daya tarik utama bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Banten.

Dalam praktiknya, Kabupaten Lebak memiliki pusat pemerintahan daerah di Rangkasbitung. Karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki, Kabupaten Lebak sangat memperhatikan sektor pariwisata & berfokus menjadi kawasan pengembangan pariwisata. Oleh karenanya, sektor pariwisata di Kabupaten Lebak menjadi sektor prioritas/unggulan & memberikan kontribusi besar terhadap PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) setiap tahun.

Hal ini terlihat dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016–2031. Tujuan adanya Peraturan Daerah ini tertuang dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016– 2031.

“... Kepariwisata Daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; dan d. memajukan kebudayaan ...”

Pelaksanaan Pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, dan kesetaraan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016–2031 Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan harus integral dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lebak, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi.

Menurut konsep yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn dalam aspek pada teorinya bahwa implementasi kebijakan itu dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan

kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Secara operasional kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai berhasil apabila sesuai dengan keadaan yang ada pada pelaksana kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak). juga memungkinkan untuk dilaksanakan pada objek kebijakan yaitu masyarakat, sebuah kebijakan akan mencapai keberhasilan apabila sesuai dengan keadaan masyarakat atau sesuai kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada agar implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak).

Dengan demikian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dinilai dari segi aspek ukuran dan tujuan kebijakan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan konsep yang diungkapkan oleh Van Matter dan Van Horn kesesuaian pemahaman ukuran dan tujuan kebijakan menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil, dengan begitu dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini belum optimal.

Sumber Daya Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)

Sumber daya merupakan instrumen penting dalam kegiatan implementasi kebijakan publik, implementasi merupakan sebuah aktifitas pelaksanaan yang akan menjamin suatu kebijakan berjalan sesuai dengan koridornya, dengan pelaksanaan yang baik akan tercipta sebuah kebijakan yang baik pula dengan pelaksanaan yang kurang baik maka akan tercipta bentuk kebijakan yang kurang baik cenderung akan menuai pro dan kontra.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam konsepnya bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang berkompeten dan kapabel telah tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hali ini pun menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Begitu juga dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak) maka harus dilihat dari berbagai sumber daya yang ada baik sumber daya manusianya yaitu pelaksana itu sendiri, sumberdaya anggaran dan sumber daya waktu yang ada untuk menjalankan Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Lebak dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Hasibuan, 2012:10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Artinya suatu organisasi harus memiliki suatu sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga tak mengalami kemunduran. Oleh karena itu, perlu dilakukan salah satu kegiatan secara berencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan sumber daya manusia karena pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia yang berbudi luhur, tangguh, cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, disiplin dan orientasi terhadap masa depan untuk

menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentu melibatkan banyak sumber daya untuk mensukseskan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak yang mana diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Dukungan sumber daya manusia terlihat dengan keterlibatan dinas teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai leadeing sektor, dinas lainnya yang terkait, serta masyarakat dan pelaku usaha. Hal itu tentunya harus diimbangi kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai pelaksana tugas di lapangan. Secara kompetensi dan struktural, tuntutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat merealisasikan dan mengkomunikasikan pada warga masyarakat terkait penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan aparatur dinas terkait, bukan hanya memilki kemampuan dalam hal mensolidkan secara internalnya saja, namun dituntut pula memiliki kemampuan untuk mensolidkan sumberdaya manusia yang tersedia di luar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka menyatukan visi untuk keberhasilan penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara operasional. Hal terpenting lain yang mendukung suatu kebijakan adalah ketersediaan anggaran. Secara teknis pelaksanaan dilapangan, anggaran merupakan salah satu faktor krusial untuk suatu program. Pertanyaannya kemudian adalah seberapa besar dana dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan dan pertanyaan penting pula adalah sumber dana kegiatan berasal darimana saja.

Berdasarkan Kebijakan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Lebak di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pembiayaan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Lebak dapat berasal dari bantuan dan juga keterlibatan swasta dalam rangka pembangunan pariwisata.

Berdasarkan ungkapan informan-informan diatas menyatakan bahwa jumlah aparatur pelaksana masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten lebak yang

memiliki potensi pendapatan Asli Daerah termasuk Kawasan Pantai Sawarna, sehingga keterlibatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sawarna cukup membantu dalam hal penyelenggaraan pariwisata. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan adanya produk-produk sektor pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah terdata dan juga menjadi rekomendasi pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk dikunjungi dan sekaligus mendapatkan penilaian tentang bagaimana status pariwisata yang ada di Kabupaten Lebak. Data produk wisata Kabupaten Lebak sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Produk Wisata Kabupaten Lebak Tahun 2024

No.	Produk Wisata	Jumlah
1	Wisata Alam	30
2	Wisata Budaya	30
3	Wisata Buatan	12

Sumber : Badan Kemenparekraf (2024)

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa produk wisata yang ada di Kabupaten lebak mulai dari wisata alam sebanyak 30, wisata budaya sebanyak 30 dan wisata Buatan sebanyak 12. Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Lebak sebagaimana keterlibatan masyarakat yang ada di Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak melalui Badan Usaha Milik Desa yang mereka bentuk dan memiliki peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan terkoordinirnya pendapatan secara baik. Berikut struktur BUM Desa yang ada di Desa Sawarna:

Tabel 7. Struktur Organisasi BUM-Desa Warna Jaya Sawarna Tahun 2024

Penasehat	: Iwa Sungkawa
Pengawas	: Kukun Kurnia
Direktur	: Jetri Andarka
Sekretaris	: Ade Suryadi
Bendahara	: Natalia Anggraeni Hasanah
Koordinator Unit Usaha Wisata	: Ace Krisnayuda
Koordinator Unit Air Bersih	: Aluk Subti
Koordinator Aunwing	: Tayudin

Sumber : BUM Desa Warna Jaya Sawarna (2024)

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa terdapat organisasi ekonomi masyarakat yang berperan dalam pengelolaan pariwisata Pantai sawarna yakni Badan Usaha Milik Desa Warna Jaya Sawarna yang berjumlah 8 orang Dimana 3 orang merupakan Koordinator yang mengkoordinir potensi dan fasilitasi pada pariwisata Pantai Sawarna.

Berdasarkan ungkapan informan di atas tergambar bahwa SDM dalam mendukung pariwisata di Pantai Sawarna masih terbatas sebagaimana disampaikan bahwa SDM yang ada khususnya di sekitar objek wisata kurang mendukung dalam hal ketrampilan berbahasa asing (khususnya bahasa Inggris), maupun dalam hal etika dan keramahan (hospitality) dalam menyambut kedatangan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Di samping itu, tenaga keamanan pariwisata bersertifikasi juga masih kurang. Kurangnya tenaga keamanan pariwisata bersertifikasi disebabkan oleh belum adanya fasilitasi pemerintah dalam mendorong pelatihan keamanan di tempat wisata yang bersertifikasi serta kurangnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang pariwisata.

Berdasarkan ungkapan-ungkapan informan dapat tergambar bahwa dari segi sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak).

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana mendukung penuh Implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Biederman (2007) bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya, seperti pada definisi berikut:

“...A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of a tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens...”

“...Kebijakan pariwisata didefinisikan suatu arah atau tindakan yang harus dilakukan oleh suatu negara, daerah, lokalitas atau rencana tujuan individu saat mengembangkan atau mempromosikan pariwisata. Prinsip kunci untuk setiap kebijakan pariwisata yaitu harus memastikan bahwa suatu negara (daerah atau lokalitas) dapat menguntungkan semaksimal mungkin dari kontribusi ekonomi dan sosial dari adanya pariwisata. Tujuan utama dari kebijakan pariwisata yaitu untuk meningkatkan kemajuan bangsa (daerah atau lokalitas) dan kehidupan warganya...”

Secara formal kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan sistem proses, penyelenggaraan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih kurang, sehingga ini mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

Sementara dukungan finansial dalam melaksanakan sebuah kebijakan itu juga menjadi hal yang sangat penting, dengan dukungan finansial yang cukup akan memberikan dampak baik pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, berikut adalah ungkapan informan terhadap dukungan pembiayaan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan kebijakan belum adanya biaya operasional khusus yang kaitan langsung dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengingat objek pariwisata Kabupaten Lebak sangat luas dan beragam.

Berdasarkan ungkapan informan bahwa biaya operasional sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Lebak, Biaya operasional sangat dibutuhkan mengingat penyelenggaraan pariwisata perlu adanya stimulan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana termasuk didalamnya anggaran yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Aspek sumber daya menjadi hal penting dalam konsep yang dikembangkan oleh Van Mater dan Van Horn, sumberdaya sangat menentukan pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal atau tidak berjalan optimal, dalam hal implementasi penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki masih minim, sehingga pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari sisi sumber daya belum optimal.

Untuk menjalankan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibutuhkan agen pelaksana secara formal baik secara institusi dan maupun secara keahlian yang dapat mendukung Implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil wawancara di atas terungkap bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait yakni dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung penuh penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Lebak karena ini sejalan dengan misi Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 yaitu :

- a) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM;
- b) Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata;
- c) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah;
- d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- e) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan ungkapan di atas tentu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini direncanakan sebagai bagian program untuk mendukung bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menyatakan:

“...Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; d. memajukan kebudayaan; e. mengangkat kekhasan dan citra daerah; f. memupuk rasa cinta tanah air; g. memperkukuh jati diri dan kesatuan nasional; dan h. mempererat persahabatan antar daerah...”

Dilihat dari Respon implementor kebijakan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan sikap bahwa mereka memberikan respon yang baik terhadap kebijakan. Respon positif terlihat dari seriusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dengan mendorong terbitnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016–2031.

Dukungan juga harus teroperasionalisasi kepada sebuah aturan yang lebih teknis yaitu adanya aturan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata berupa Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, keberadaan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepariwisata untuk menjamin pelaksanaan yang lebih baik lagi karena Bupati sebagai eksekutor sebuah kebijakan melalui dinas teknis terkait. Dari aturan teknis itu diharapkan dapat membantu masarakat Desa Sawarna untuk mendapatkan bantuan permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha pariwisata dan adanya upaya-upaya teknis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun asing.

Berdasarkan ungkapan-ungkapan informan bahwa pelaksanaan dalam hal pengawasan penindakan serta pemberian sanksi belum

optimal dilakukan, Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisata belum bisa melakukan penindakan karena belum adanya aturan teknis mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata melalui Peraturan Bupati. Bentuk sanksi yang ada didalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisata bentuknya sanksi administratif, yang mana pelaksanaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Oleh karena itu dengan melihat aspek karakteristik agen pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum optimal, karena disebabkan pelaksanaan yang belum utuh, pelaksanaan SOP belum menyeluruh, begitu juga dengan sanksi yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum diterapkan karena belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Pelaksanaan yang masih belum optimal juga disebabkan persoalan aturan turunan berupa Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum diterbitkan, sehingga dukungan yang diberikan untuk mengoptimalkan kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata masih dapat dikatakan setengah hati. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Melihat berbagai permasalahan diatas maka dari sisi aspek karakteristik agen pelaksana implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak)

Aspek terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Lingkungan eksternal dapat memberi dampak pada implementasi kebijakan, walaupun didalam implementasi kebijakan sudah direncanakan pelaksanaannya maka bukan tidak mungkin lingkungan eksternal (ekonomi, sosial, politik) memberikan dampak pada tahapan-tahapan implementasi kebijakan, sehingga implementasi akan mendapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya ketika lingkungan eksternal itu tidak stabil atau tidak kondusif.

Implementasi Kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilihat berdasarkan kondisi lingkungan ekonomi sosialnya peneliti menilai kurang mendukung dalam pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikethui berdasarkan informasi wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada awalnya Kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebagai aspek penentu terselenggaranya kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, berkaitan dengan penilaian kinerja implementasi Kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Lingkungan sosial dan ekonomi dapat mendorong kinerja implementasi penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga upaya implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah mensyaratkan harus mendapat dukungan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Untuk melihat fenomena tersebut maka dalam

hal ini digambarkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaannya mendapat dorongan dari lingkungan eksternal sebagaimana ungkapan informan I1 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, mengungkapkan bahwa:

“...Sangat berdampak sekali lingkungan eksternal dari sisi pendidikan dan perekonomian sebetulnya mengingat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah dan masih banyaknya pengangguran memicu masyarakat menggantungkan diri dari kehidupan pariwisata Pantai Sawarna tanpa membekali pengetahuan dan keterampilan. Lingkungan sosial juga berdampak, dengan alih profesi dari buruh tani menjadi pelaku pariwisata, profesi petani karena generasi penerus dibidang pertanian semakin berkurang dan memilih bekerja diluar bidang pertanian, ini saya rasa akan berdampak sekali padahal pertanian ini sendiri dapat menjadi potensi pariwisata seperti di Bali...”. (wawancara 5 Juni 2024).

Dari ungkapan Informan I1 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi sosial dan ekonomi sangat berdampak pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, setidaknya ada dua yang dapat dilihat dari dampak lingkungan ekonomi dan sosial terhadap kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu perubahan kondisi ekonomi yang lemah akan menjadi penghambat terselenggaranya kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan perubahan kondisi sosial masyarakat menjadi masyarakat industri pariwisata dari masyarakat tani.

Berdasarkan gambaran wawancara di atas, dapat diketahui bahwa lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lebak cukup berdampak pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil di

Kabupaten Lebak yaitu masyarakatnya yang berprofesi sebagai buruh tani masih banyak yang berstatus ekonomi lemah dimana ini dapat mengakibatkan dukungan eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga dengan kondisi lingkungan sosial Kabupaten Lebak, kondisi lingkungan sosial Kabupaten Lebak berdasarkan wawancara mengalami kondisi yang kurang ideal dimana masyarakat tergerak untuk masuk kedalam dunia industri pariwisata tanpa pengetahuan dan keterampilan mencari mata pencaharian tanpa koordinasi dengan BUM Desa sehingga muncul lahan-lahan parkir liar dan penetapan harga makanan dan Homestay tidak sesuai dengan standard BUM Desa, hal ini tentu berdampak pada minat wisatawan untuk berkunjung lagi ke Pantai Sawarna. Sementara peminat setiap tahunnya semakin menurun. Tentunya hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dari gambaran informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial dan ekonomi mereka cukup berdampak pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak berjalan optimal.

Dengan demikian dari gambaran wawancara dengan berbagai informan mengenai kondisi lingkungan politik yang ada pada kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Sawarna Kabupaten Lebak, terlihat adanya dampak dari lingkungan kondisi politik terhadap Kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Peraturan daerah merupakan kebijakan yang dilahirkan hasil politik, sehingga memungkinkan dalam pelaksanaannya kondisi politik yang kurang stabil akan mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Melihat berbagai informasi yang tersaji peneliti menyimpulkan aspek lingkungan eksternal (ekonomi, sosial, politik) yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki dampak yang kuat terutama lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan

lingkungan politik memiliki dampak terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa adanya kesesuaian antara asumsi dasar yang peneliti ajukan dimana peneliti mengungkapkan pada asumsi dasar pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dirasa belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Capaian dari pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Dalam implementasi penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih banyak terdapat banyak masalah yang menghambat pelaksanaan kebijakan, dan juga belum adanya upaya komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak untuk memperbaiki jalannya implementasi penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Lebak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam upaya menerbitkan aturan teknis berupa Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara kepada informan-informan dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn didalam menganalisis penelitian mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak) dapat diketahui dengan gamblang bahwa Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten lebak belum optimal, dalam pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sehingga tujuan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum bisa tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Alfa Beta.
- Baskoro, BRA dan Cecep Rukendi, Maret 2008, *Membangun Kota Pariwisata Berbasis*

Komunitas: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Kepariwisata Indonesia. Volume 3, No.1.

Ira Ratna Wulan, Turtianto, Wiwik Widayati.2012.Strategi Pengelolaan Obyek Wisata Pangandaran Kabupaten Ciamis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Mashyuri dan M.Zainuddin.2008.Metodologi Penelitian-pendekatan praktis dan aplikatif.Bandung: PT Refika Aditama.

Moleong, Lexy J.2007.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Muljadi A.J.2010. Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Nur'aini, Fajar.2016. Teknik Analisis SWOT. Yogyakarta: Quadrant.

OkaA.Yoeti.1996.Pengantar Ilmu pariwisata.Bandung: Angkasa.

Silaen,Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.

Steiner, George.A dan John.B Miner.1997. *Kebijakan dan strategimanajemen.alih bahasa oleh Ticoalu dan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono,2011. *Metode Penelitian Kuantitati,Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.